



Kolaborasi BUMDes dan Program CSR dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Petani Kopi di Desa Baloi, Kabupaten Murung Raya)

Novri Amdani Saragih^{1*}, Saputra Adiwijaya², Ida Bagus Suryanatha³

¹⁻³ Program Studi Sosiologi, Universitas Palangka Raya, Indonesia

E-mail: novrisaragih659@gmail.com ^{1*}, saputra.adiwijaya@fisip.upr.ac.id ², ida.bagus@fisip.upr.ac.id ³

*Penulis Korespondensi: novrisaragih659@gmail.com

Abstract. *This study analyzes community empowerment through the collaboration between the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Baloi Usaha Mandiri and the Corporate Social Responsibility (CSR) program of PT Maruwai Coal in developing the local coffee commodity "Kopi Baloi" in Tumbang Baloi Village, Murung Raya Regency. A qualitative case-study approach was applied using the Asset-Based Community Development (ABCD) concept, supported by primary field data triangulated with the company's Social Mapping report and Community Development Master Plan (RIPPM). The findings show that the empowerment rests on five community capitals human, social, physical, financial, and natural which have turned local coffee into value-added products such as Kopi Baloi and the "Baloi's Signature" coffee-leaf tea. However, a gap emerges: bonding social capital is strong, whereas bridging social capital remains weak, reflected in a marketing chain still dominated by local markets and middlemen. The study concludes that sustainability requires strengthening bridging social capital, improving branding and marketing, business-to-business (B2B) and business-to-customer (B2C), and addressing community grievances toward the company.*

Keywords: *Asset-Based Community Development; BUMDes; Corporate Social Responsibility (CSR); Social Capital.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Baloi Usaha Mandiri dan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Maruwai Coal dalam pengembangan komoditas kopi lokal "Kopi Baloi" di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan konsep Asset-Based Community Development (ABCD), didukung data primer lapangan yang di triangulasi dengan hasil penelitian Pemetaan Sosial dan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan bertumpu pada lima modal komunitas manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam yang mengangkat kopi lokal menjadi produk bernilai tambah seperti Kopi Baloi dan Teh Daun Kopi "Baloi's Signature". Namun ditemukan kesenjangan: ikatan internal (bonding social capital) sangat kuat, sedangkan jaringan ke pasar yang lebih luas (bridging social capital) masih lemah, tercermin dari rantai pemasaran yang masih didominasi pasar lokal dan pengepul. Penelitian menyimpulkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan menuntut penguatan bridging social capital, perbaikan strategi branding dan pemasaran business-to-business (B2B) dan business-to-customer (B2C), serta penyelesaian keluhan sosial masyarakat terhadap perusahaan.

Kata Kunci: *Asset-Based Community Development; BUMDes; CSR; Modal Sosial; Pemberdayaan Masyarakat.*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang merata dan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dari perkotaan hingga perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami transformasi paradigma yang fundamental, yakni bergeser dari pola *top-down* menuju model penguatan kemandirian lokal yang bertumpu pada optimalisasi potensi spesifik wilayah. Dengan demikian, desa tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek berdaulat yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan sumber daya ekonominya demi kesejahteraan masyarakat (Amnurdiand et al., 2024).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan upaya sistematis penguatan agensi untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap aktor eksternal, dan merupakan bagian dari proses perubahan sosial yang direncanakan dan digerakkan secara reflektif (Rheinatus, 2021). Hal ini sejalan dengan mandat regulasi yang memberi ruang bagi desa untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonominya melalui institusi lokal, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam konteks regional, Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tantangan khas karena wilayahnya didominasi sektor ekstraktif yang kerap menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap korporasi besar.

Dalam penelitian ini, salah satu lokus yang mencerminkan dinamika wilayah yang didominasi sektor ekstraktif seperti yang disampaikan sebelumnya adalah Desa Tumbang Baloi, Kecamatan Barito Tuhup Raya. Desa ini berada pada Ring I wilayah operasional PT Maruwai Coal dan dihuni 759 jiwa (251 kepala keluarga) dengan mayoritas penganut Hindu Kaharingan serta budaya Dayak yang kuat (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). Perekonomian warga bertumpu pada perkebunan, terutama karet dan kopi, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Di tengah kondisi tersebut, BUMDes secara sosiologis berfungsi sebagai *social enterprise* yang mengorganisasi modal sosial masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi kolektif.

Pemberdayaan di Desa Tumbang Baloi melalui komoditas kopi yang dikenal dengan sebutan "Kopi Baloi" menjadi menarik karena melibatkan kolaborasi strategis antara BUMDes Baloi Usaha Mandiri dan program CSR PT Maruwai Coal yang telah berjalan sejak 2019 (Hasil Penelitian RIPPM PT Maruwai Coal, 2024). Sinergi ini diharapkan menyentuh tiga dimensi pemberdayaan, yaitu ekonomi (pendapatan), sosial (jaringan), dan agensi dalam pengambilan keputusan. Meskipun proses pemberdayaan telah mencapai tahap hilirisasi bahkan melahirkan produk turunan seperti Teh Daun Kopi "Baloi's Signature" realitas di lapangan menunjukkan diskoneksi antara keberhasilan produksi dan keberhasilan pasar. Secara teoritis, hambatan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan di Desa Tumbang Baloi kuat pada aspek *bonding social capital* (ikatan internal), tetapi lemah pada *bridging social capital*, yakni jaringan yang menghubungkan BUMDes dengan distributor yang lebih luas (Putnam, 2000).

Sejalan dengan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan masyarakat pada komoditas kopi melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu dengan mengidentifikasi dan memobilisasi aset internal petani kopi (modal manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam), mengidentifikasi faktor penghambat distribusi, serta merumuskan strategi penguatan modal sosial agar Kopi Baloi dapat menjadi motor penggerak ekonomi berkelanjutan bagi rumah tangga petani.

2. KAJIAN TEORITIS

Perubahan Sosial

Pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi BUMDes dengan CSR PT Maruwai Coal pada komoditas kopi pada hakikatnya merupakan bentuk perubahan sosial bagi masyarakat Desa Tumbang Baloi. Perubahan sosial berkenaan dengan pergeseran nilai, norma, struktur, dan pola interaksi dalam masyarakat yang tidak terjadi secara serta-merta, melainkan berlangsung sebagai proses yang dipicu oleh pengetahuan, kebutuhan, reflektivitas, dan intervensi yang terencana (Rheinatus, 2021). Dalam perspektif sosiologis, perubahan sosial tidak hanya dipahami sebagai sebuah peristiwa, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan interaksi timbal balik antara struktur sosial dan agensi manusia, sehingga arah perubahan ditentukan oleh makna dan tujuan yang melekat pada tindakan kolektif masyarakat. Secara teoritis, gagasan perubahan sosial yang direncanakan (*planned change*) berakar pada pemikiran Kurt Lewin, yang memandang perubahan terencana sebagai proses bertahap yang melewati tiga fase, yaitu pencairan (*unfreezing*) terhadap pola lama, pergerakan (*moving*) menuju pola baru, dan pembekuan kembali (*refreezing*) agar perubahan melembaga secara berkelanjutan (Lewin, 1951). Dalam kerangka tersebut, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dirancang secara sadar oleh pihak tertentu untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi sosial yang lebih baik.

Perubahan sosial yang direncanakan selalu menuntut kehadiran agen perubahan (*agent of change*), yakni pihak yang memimpin, memfasilitasi, dan menggerakkan masyarakat menuju kondisi yang dikehendaki. Konsep agen perubahan ini dikembangkan secara sistematis oleh Lippitt, Watson, dan Westley (1958), yang memerinci perubahan terencana ke dalam serangkaian fase, mulai dari penyadaran akan kebutuhan untuk berubah, pembentukan relasi perubahan antara agen dan masyarakat, proses perubahan itu sendiri, pemantapan hasil, hingga pengalihan dan pengakhiran peran (*terminal relationship*) ketika masyarakat dinilai telah mampu mandiri. Kerangka ini sangat relevan dengan penelitian ini karena CSR PT Maruwai Coal berperan sebagai agen perubahan eksternal yang mendampingi masyarakat, sedangkan keberhasilan pemberdayaan pada akhirnya ditandai oleh kesiapan BUMDes mengambil alih peran tersebut secara mandiri. Dalam konteks pembangunan, peran agen perubahan dapat diemban oleh pemerintah, lembaga sosial, perusahaan melalui program tanggung jawab sosialnya, maupun tokoh dan kelembagaan lokal seperti BUMDes (Herlina et al., 2022). Pengembangan sumber daya manusia menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perubahan, sebab perubahan yang berkelanjutan bertumpu pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kolektif warga. Sejalan dengan itu, sejumlah studi terkini

menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk perubahan sosial terencana yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus solidaritas kolektif. Penguatan kapasitas kelembagaan desa, sebagaimana ditemukan Aziza et al. (2024), terbukti mendorong transformasi perilaku ekonomi warga dari pola subsisten menuju orientasi kewirausahaan sekaligus membuat tata kelola ekonomi desa menjadi lebih produktif dan partisipatif. Dengan demikian, pemberdayaan komoditas kopi melalui kolaborasi BUMDes dan CSR di Desa Tumbang Baloi dapat diposisikan sebagai proses perubahan sosial yang direncanakan, terukur, dan berbasis potensi lokal, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) secara etimologis berarti memberikan daya atau penguatan agar masyarakat menjadi pihak yang berdaya, mandiri, dan mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dalam paradigma pembangunan kontemporer, pemberdayaan tidak lagi dimaknai sebagai pemberian bantuan material yang bersifat karitatif atau disebut secara sukarela yang bersifat sementara, melainkan sebagai upaya sistematis untuk menumbuhkan kesadaran kritis, kapasitas, dan kemandirian masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek (Rasyid et al., 2025). Pemberdayaan yang sejati menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang memiliki kebebasan untuk mengidentifikasi kebutuhannya, merumuskan solusi, dan mengelola sumber dayanya sendiri. Orientasi ini sejalan dengan semangat regulasi desa yang menekankan pentingnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya.

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan berlangsung secara bertahap, mulai dari penyadaran, pengkapasitasan, hingga pendayaan. Pada tahap penyadaran, masyarakat dibangun kesadarannya bahwa mereka memiliki potensi dan hak untuk berkembang; pada tahap pengkapasitasan, masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan; sedangkan pada tahap pendayaan, masyarakat diberi ruang untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya secara mandiri. Tchida dan Stout (2024) menegaskan bahwa pemberdayaan yang holistik pada dasarnya merupakan proses redistribusi kekuasaan yang mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu kekuasaan dari dalam diri (*power within*) berupa kepercayaan diri dan kesadaran kritis, kekuasaan untuk bertindak dan berpartisipasi secara kolektif dalam pengambilan keputusan (*power with*), serta kekuasaan atas akses terhadap sumber daya (*power over resources*). Ketiga dimensi tersebut menjadi penanda apakah suatu program benar-benar memberdayakan atau justru melanggengkan ketergantungan.

Berbagai penelitian terdahulu memperkuat peran sentral kelembagaan ekonomi lokal dalam pemberdayaan. Hailudin (2021) menemukan bahwa BUMDes berperan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan lapangan usaha dan penguatan pendapatan rumah tangga. Sementara itu, keberhasilan pemberdayaan pada akhirnya sangat ditentukan oleh peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program (Aziza et al., 2024). Dengan demikian, pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari penguatan modal manusia dan kelembagaan lokal sebagai fondasi kemandirian jangka panjang.

Asset-Based Community Development (ABCD)

Asset-Based Community Development (ABCD) merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan aset dan kekuatan internal komunitas sebagai titik tolak sekaligus motor penggerak perubahan, dikembangkan oleh John Kretzmann dan John McKnight pada 1993 (Kretzmann & McKnight, 1993). Berbeda dengan model berbasis kebutuhan (*needs-based*) yang cenderung memandang masyarakat dari sisi kekurangan dan masalahnya, ABCD menganut prinsip *inside-out*, yaitu pembangunan yang dimulai dari apa yang "dimiliki" masyarakat, bukan dari apa yang "tidak dimiliki". Pendekatan ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kepemilikan (*ownership*) karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek aktif yang terlebih dahulu menggali, memetakan, dan memobilisasi kekuatan internalnya sebelum mencari intervensi dari luar. Dengan cara ini, ketergantungan terhadap bantuan eksternal dapat ditekan dan keberlanjutan program lebih terjamin.

Penerapan ABCD di berbagai desa di Indonesia menunjukkan bahwa pemetaan dan mobilisasi aset lokal mampu menumbuhkan kemandirian sekaligus transformasi sosial berupa peningkatan kepercayaan diri, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif warga terhadap pembangunan (Bela et al., 2024). Hal ini menjadikan ABCD relevan untuk menganalisis pengembangan komoditas unggulan desa seperti kopi, yang bertumpu pada aset alam dan keterampilan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, ABCD mengidentifikasi aset komunitas yang dalam kerangka penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihoods*) dikenal sebagai lima modal yang saling berinteraksi atau berkaitan satu sama lain (Setiawan, 2025). Pertama, modal manusia (*human capital*) merujuk pada pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas kerja yang dimiliki warga; dimana modal ini menentukan kemampuan masyarakat mengelola peluang ekonomi, dalam halnya keterampilan petani Desa Tumbang Baloi dalam membudidayakan dan mengolah biji kopi menjadi produk siap jual. Kedua, modal sosial (*social capital*) mencakup pada jaringan, kepercayaan, norma, dan kelembagaan lokal yang memungkinkan tindakan kolektif, sebagaimana tampak pada keberadaan BUMDes, kelompok

tani, dan lembaga adat di Desa Tumbang Baloi. Ketiga, adalah modal fisik (*physical capital*) berupa infrastruktur dan sarana pendukung produksi seperti jalan, listrik, peralatan pasca panen, dan kemasan, yang ketersediaannya mempercepat hilirisasi dan peningkatan mutu produk Kopi Baloi. Keempat, modal finansial (*financial capital*) meliputi pendapatan, tabungan, akses kredit, dan sumber pembiayaan seperti dana desa serta dukungan CSR yang menjadi modal pengembangan usaha. Kelima, modal alam (*natural capital*) adalah sumber daya alam yang menjadi basis penghidupan, dalam hal ini lahan dan iklim yang sesuai untuk budidaya kopi robusta khas Desa Tumbang Baloi, yang juga memiliki struktur dan komposisi tanah yang cukup subur ditandai dengan warna abu-abu kehitaman. Sejalan dengan hal tersebut, khusus pada modal sosial, Putnam (2000) membedakan *bonding social capital* yang merekatkan ikatan internal komunitas dan *bridging social capital* yang menghubungkan komunitas dengan jaringan di luar dirinya. Notabene, hasil penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal sendiri menggunakan kerangka lima modal *Sustainable Livelihood Approach* yang setara, sehingga pendekatan ABCD selaras dan relevan untuk menganalisis kasus pemberdayaan di Desa Tumbang Baloi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan pilar ekonomi kerakyatan di tingkat desa yang lahir dari semangat kemandirian dan kedaulatan ekonomi lokal. Secara konseptual, BUMDes berkarakter *hybrid organization*, yakni berperan sebagai lembaga sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekaligus lembaga komersial yang menuntut efisiensi dan profesionalisme pengelolaan. Karakter ganda ini menuntut keseimbangan antara misi sosial dan tujuan ekonomi agar BUMDes tidak kehilangan orientasi keberpihakannya kepada masyarakat, namun tetap mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Secara ideal, BUMDes menjadi wadah konsolidasi potensi ekonomi desa, mulai dari pengelolaan komoditas unggulan, pengembangan UMKM, hingga penyediaan layanan bagi warga. Kedudukan hukum BUMDes saat ini telah mengalami penguatan yang signifikan melalui serangkaian regulasi nasional. Secara historis, BUMDes memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkannya sebagai badan usaha milik desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan berbagai jenis usaha demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kedudukan tersebut diperkuat secara fundamental oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 117, yang mengubah status BUMDes dari sekadar badan usaha menjadi badan hukum (*legal entity*). Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,

permodalan, pengelolaan aset, hingga kerjasama BUMDes dengan pihak lain. Perolehan status badan hukum ini memberikan kepastian dan legitimasi bagi BUMDes untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, termasuk menjalin kemitraan dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga seperti badan usaha milik negara maupun korporasi pertambangan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa efektivitas BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, akses pasar, permodalan, dan modal sosial yang dimiliki desa. Hailudin (2021) menemukan bahwa BUMDes yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat UMKM desa, sementara penguatan kapasitas pengelola merupakan faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa (Aziza et al., 2024). Keberhasilan BUMDes juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat yang ditopang oleh modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma yang kuat. Namun demikian, pengalaman di lapangan juga mencatat bahwa kendala utama BUMDes justru terletak pada lemahnya jaringan pemasaran dan keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas, sehingga produk unggulan desa sering kali sulit menembus pasar di luar wilayahnya.

Dalam konteks Desa Tumbang Baloi, BUMDes hadir sebagai salah satu lembaga sosial-ekonomi desa di samping Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat (Mantir), PKK, Karang Taruna, dan Posyandu, serta berperan mengelola dan mengembangkan unit usaha desa guna meningkatkan pendapatan desa (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). BUMDes Baloi Usaha Mandiri memfokuskan kegiatannya pada komoditas kopi sebagai produk unggulan, antara lain melalui pembinaan Kelompok Tani Kopi dan pelatihan pengolahan biji kopi yang telah berjalan sejak tahun 2019. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes diharapkan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi desa yang mengonsolidasikan potensi lokal sekaligus menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, termasuk korporasi pertambangan melalui program tanggung jawab sosialnya. Kerangka inilah yang menempatkan BUMDes sebagai unit kelembagaan yang relevan untuk menganalisis pemberdayaan berbasis aset di Desa Tumbang Baloi.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan pertimbangan etika, ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi operasionalnya demi menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan semata-mata bagi pemegang saham. Paradigma CSR terus berkembang, mulai dari pandangan filantropis yang menempatkan CSR sebagai bentuk kedermawanan, menuju pandangan strategis yang menempatkan CSR sebagai bagian inti dari keberlanjutan bisnis. Puncak dari

pergeseran tersebut adalah konsep *Creating Shared Value* (CSV) yang diperkenalkan oleh Porter dan Kramer (2011). CSV menekankan bahwa keberhasilan korporasi dan kesejahteraan komunitas merupakan dua hal yang saling bergantung dan dapat diciptakan secara bersamaan. Secara sederhana, CSV dapat dipahami sebagai kebijakan dan praktik operasional yang meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya. Berbeda dari CSR filantropis yang umumnya bersifat sukarela, terpisah dari kegiatan inti bisnis, dan diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, CSV menempatkan penciptaan nilai sosial sebagai bagian integral dari strategi mencari keuntungan, sehingga manfaat sosial dan manfaat ekonomi tumbuh bersamaan dan saling memperkuat. Untuk mewujudkannya, Porter dan Kramer (2011) menawarkan tiga jalan menciptakan nilai bersama, yaitu mendefinisikan ulang produk dan pasar dengan menjawab kebutuhan sosial yang belum terpenuhi, menata ulang produktivitas rantai nilai melalui efisiensi sumber daya dan pemberdayaan pemasok lokal, serta membangun klaster pendukung di wilayah operasi perusahaan berupa penguatan kelembagaan, keterampilan, dan infrastruktur lokal. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan komoditas kopi melalui penguatan BUMDes dan kelompok tani dapat dibaca sebagai praktik CSV, yakni ketika perusahaan tambang turut menumbuhkan kapasitas ekonomi lokal yang pada gilirannya memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan operasionalnya. Perspektif kritis tetap diperlukan untuk mengingatkan bahwa relasi korporasi-komunitas tidak selalu setara, sehingga CSR semestinya diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan baru.

Dalam konteks industri ekstraktif dalam konteks ini yaitu pertambangan, tanggung jawab sosial perusahaan tidak bersifat sukarela semata, melainkan diwajibkan oleh regulasi sebagai bagian dari kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan pemegang izin menyusun program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perusahaan tambang harus memberikan kontribusi nyata yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Penelitian Wahyuningsih et al. (2023) pada perusahaan tambang batubara menunjukkan bahwa program CSR yang difokuskan pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat mampu mempersiapkan kemandirian warga menghadapi masa pascatambang. Pada tataran yang lebih luas, Rathobei et al. (2024) menegaskan bahwa penciptaan nilai yang luas (*broad value creation*) dalam industri pertambangan menuntut

pengelolaan pemangku kepentingan yang partisipatif dan adil agar program benar-benar berdampak serta diterima masyarakat. Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa CSR yang efektif harus terintegrasi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan diarahkan untuk memperkuat kemandirian, bukan melanggengkan ketergantungan.

Komoditas Kopi dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis bagi perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber devisa ekspor maupun sebagai penopang penghidupan jutaan rumah tangga petani. Sebagian besar produksi kopi nasional bertumpu pada perkebunan rakyat berskala kecil, termasuk kopi jenis robusta yang banyak diusahakan di wilayah dataran rendah hingga menengah, sebagaimana karakteristik perkebunan rakyat di Kalimantan Tengah. Karakteristik ini menempatkan kopi sebagai komoditas yang sangat lekat dengan ekonomi perdesaan, namun sekaligus rentan terhadap fluktuasi harga pasar, panjangnya rantai tata niaga, serta dominasi pengepul dan pengijon yang kerap menekan posisi tawar petani. Dalam kondisi demikian, nilai tambah dari komoditas kopi sering kali tidak kembali secara optimal kepada produsen di tingkat hulu, sehingga kesejahteraan petani tidak serta-merta meningkat meskipun kegiatan produksi tetap berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan kopi sebagai instrumen pemberdayaan tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi, melainkan menuntut hilirisasi dan penguatan kelembagaan pemasaran. Pengolahan pascapanen dan diversifikasi produk, dari biji mentah menjadi kopi bubuk kemasan hingga produk turunan seperti teh daun kopi, merupakan upaya mengonversi aset alam dan keterampilan lokal menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi, sejalan dengan logika *Asset-Based Community Development* yang menjadikan aset komunitas sebagai titik tolak pembangunan (Bela et al., 2024). Namun, keberhasilan konversi tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan membangun merek (*branding*) dan memperluas jaringan pasar di luar komunitas. Pengalaman pengembangan komoditas desa menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan dan jaringan pemasaran menjadi kendala utama yang menahan produk unggulan menembus pasar yang lebih luas (Hailudin, 2021). Dengan demikian, kopi tidak semata-mata dipahami sebagai komoditas pertanian, tetapi sebagai aset penghidupan yang keberlanjutannya bergantung pada keterpaduan antara penguatan produksi, modal sosial, dan akses pasar (Setiawan, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam proses pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi BUMDes dan program CSR di Desa Tumbang Baloi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang kompleks di balik proses pemberdayaan, bukan sekadar mengukurnya secara numerik (Creswell & Poth, 2018). Metode studi kasus digunakan karena memungkinkan pengkajian fenomena kontemporer secara holistik atau menyeluruh dalam konteks nyata kehidupan masyarakat (Yin, 2018). Penelitian ini juga menggunakan perspektif kekuatan (*strength perspective*) yang memandang masyarakat sebagai subjek pemilik aset, serta menerapkan kerangka *Asset-Based Community Development* (ABCD) untuk memetakan lima modal komunitas.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilengkapi observasi lapangan dan studi dokumentasi. Seluruh data primer digali melalui wawancara mendalam secara perorangan agar setiap informan dapat menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara leluasa, jujur, dan mendalam. Informan ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap program, yang mewakili tiga kelompok aktor utama, yaitu: (1) masyarakat yang diberdayakan, yakni petani kopi serta pengurus dan anggota BUMDes Baloi Usaha Mandiri; (2) aktor pemerintahan desa, yakni kepala desa dan perangkat Desa Tumbang Baloi; dan (3) aktor dari pihak perusahaan, yakni tim Community Development (CSR) PT Maruwai Coal. Pelibatan ketiga kelompok aktor ini bertujuan menangkap perspektif yang utuh dan berimbang atas kolaborasi pemberdayaan, yaitu dari sisi penerima manfaat, pemerintah desa, dan perusahaan.

Untuk memperkuat kredibilitas data, hasil wawancara di triangulasi dengan dokumen sekunder perusahaan, yakni hasil penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal (2025), hasil penelitian Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) 2024--2028, serta buletin COMDEV NEWS AlamTri (Edisi I/Mei dan Edisi II/Oktober 2025). Data dianalisis secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan antaraktor, serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, sehingga simpulan yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu sumber tunggal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa dan Produk Unggulan

PT Maruwai Coal merupakan anak usaha PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang berada di bawah holding PT AlamTri Resources Tbk (sebelumnya Adaro Energy). Desa Tumbang Baloi berada dalam lingkup operasional langsung perusahaan (Ring I) sehingga ditetapkan sebagai wilayah pengembangan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). Profil demografi desa diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Demografi Desa Tumbang Baloi (2024).

Indikator	Data
Jumlah penduduk	759 jiwa (251 kepala keluarga)
Jenis kelamin	Laki-laki 392 (51,7%); perempuan 367 (48,3%)
Komposisi agama	Hindu Kaharingan 334; Islam 229; Kristen 103; Katolik 93
Lembaga sosial	BPD, Lembaga Adat (Mantir), PKK, Karang Taruna, BUMDes, Posyandu
Infrastruktur kunci	PAUD, TK, SD, SMP; Pustu, Polindes, Posyandu; Pasar (1)
Mata pencaharian utama	Perkebunan (karet, kopi), bertani padi, walet

Sumber: diolah dari hasil penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal (2025) dan RIPPM (2024)

Produk unggulan desa adalah kopi robusta lokal yang diolah BUMDes Baloi Usaha Mandiri menjadi dua produk: "Kopi Baloi" (kemasan siap seduh dan bubuk kasar) serta Teh Daun Kopi "Baloi's Signature" sebagai produk turunan (Hasil Penelitian RIPPM PT Maruwai Coal, 2024). Kedua produk telah berlogo halal dan berlabel Adaro Minerals. Pengembangan kopi ini merupakan tindak lanjut program PPM 2019--2023 yang menetapkan kopi sebagai komoditas unggulan Desa Tumbang Baloi. Pemilihan kopi sebagai komoditas unggulan sejalan dengan prinsip ABCD yang menjadikan aset alam dan keterampilan lokal sebagai titik tolak pemberdayaan (Bela et al., 2024).

Secara kelembagaan, BUMDes Baloi Usaha Mandiri merupakan satu-satunya badan usaha milik desa di Tumbang Baloi dan menjadi tumpuan konsolidasi ekonomi desa. BUMDes berfungsi mengelola serta mengembangkan unit usaha desa untuk meningkatkan pendapatan desa, dengan fokus utama pada pengolahan komoditas kopi. Aktivitas pemberdayaan ekonomi yang paling menonjol adalah pembinaan Kelompok Tani Kopi melalui pelatihan pengolahan biji kopi yang berlangsung sejak 2019 hingga sekarang, sehingga desa mampu menghasilkan komoditas kopi unggulan (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). Dalam menjalankan perannya, ketua BUMDes memegang posisi sentral karena memiliki jejaring yang luas, khususnya dengan PT Maruwai Coal, yang memudahkan kolaborasi pengembangan potensi ekonomi desa sekaligus pembukaan akses pasar yang lebih luas.

Pemetaan aktor memperlihatkan bahwa relasi BUMDes dengan pemangku kepentingan utama relatif harmonis dan menjadi modal sosial yang penting. BUMDes memiliki hubungan baik dengan pemerintah desa yang turut mendukung program seperti Kelompok Tani Kopi, dengan Karang Taruna sebagai mitra kegiatan kepemudaan, serta dengan PT Maruwai Coal yang memberikan dukungan CSR secara cukup rutin kepada BUMDes Tumbang Baloi. Konstelasi relasi yang saling mendukung ini memperlihatkan kuatnya *bonding social capital* pada tingkat kelembagaan desa, yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan program pemberdayaan berbasis aset.



Gambar 1. Produk Kopi Baloi dan Teh Daun Kopi "Baloi's Signature".

Pemetaan Lima Modal Komunitas (ABCD)

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pemberdayaan di Desa Tumbang Baloi bertumpu pada lima modal yang saling berkaitan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2 dan diuraikan berikutnya.

Tabel 2. Pemetaan Lima Modal Komunitas Desa Tumbang Baloi.

Modal	Potensi	Tantangan
Manusia	Pengalaman bertani turun-temurun; kelompok tani binaan sejak 2019; transfer teknologi pengolahan kopi dari CSR	Pendidikan formal rata-rata SD/SMP; SMA harus ke kecamatan; pengangguran kelompok muda (18–25 th) tinggi
Alam	Lahan & iklim cocok untuk kopi robusta khas; komoditas karet, lada, kopi	Kebun komoditas sempat ditinggalkan akibat harga jatuh; perlu revitalisasi; ladang berpindah
Finansial	Pendapatan rumah tangga rata-rata relatif tinggi (multi-sumber); dana desa; dukungan CSR	Pendapatan tani rendah (rata-rata Rp94.952/bln); pemasaran dikuasai pengijon/pengepul; biaya transportasi tinggi
Sosial	Modal sosial kuat: BPD, Mantir Adat, PKK, Karang Taruna, BUMDes, Posyandu; forum desa; kelompok perempuan bank sampah	Bridging capital lemah: jaringan ke distributor/ritel luar terbatas; rantai pasar masih lokal

Fisik	Pustu, Polindes, Posyandu, Pasar, tandon air, penguat sinyal; peralatan & kemasan dari CSR	Fasilitas sekolah kurang memadai (listrik/komputer/internet); sebagian sanitasi belum layak
-------	--	---

Sumber: diolah dari hasil penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal (2025), RIPPM (2024), dan COMDEV NEWS AlamTri (2025)

Modal Manusia

Mayoritas warga berlatar pendidikan SD dan SMP; akses pendidikan di desa terbatas hingga jenjang SMP sehingga warga harus menempuh perjalanan ke kecamatan untuk jenjang SMA dan perguruan tinggi (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). Melalui pelatihan kelompok tani yang berjalan sejak 2019, program pemberdayaan meningkatkan keterampilan budidaya dan pengolahan pascapanen, sekaligus melahirkan *champion* lokal yang menjaga keberlanjutan produksi. Temuan ini sejalan dengan hasil Aziza et al. (2024) yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas (*capacity building*) merupakan faktor kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi desa. Tantangan yang tersisa adalah tingginya pengangguran kelompok muda dan keterbatasan fasilitas pembelajaran digital di desa (Hasil Penelitian RIPPM PT Maruwai Coal, 2024). Selain keterampilan teknis, modal manusia di Desa Tumbang Baloi juga bertumpu pada pengetahuan bertani turun-temurun masyarakat Dayak yang menjadi basis budaya produksi kopi. Program CSR berperan menambah lapisan pengetahuan baru melalui transfer teknologi pengolahan pascapanen, sehingga keterampilan warga bergeser dari sekadar membudidayakan menjadi mengolah dan mengemas produk bernilai tambah. Namun, keberlanjutan kapasitas ini menuntut kaderisasi yang menasar kelompok muda, sebab tingginya pengangguran usia produktif berpotensi memutus regenerasi petani dan pengelola usaha desa apabila tidak diiringi penciptaan peluang kerja lokal.

Modal Alam

Aset alam dominan berupa kebun kopi robusta dengan karakter rasa khas, di samping karet dan lada. Dokumen RIPPM mencatat bahwa kebun komoditas unggulan ini sempat ditinggalkan ketika harga jatuh sehingga banyak lahan tidak terawat dan memerlukan revitalisasi (Hasil Penelitian RIPPM PT Maruwai Coal, 2024). Kondisi ini menegaskan urgensi pendekatan ABCD yang mengembalikan perhatian masyarakat pada aset yang sesungguhnya telah dimiliki, namun belum dioptimalkan (Bela et al., 2024). Suhu wilayah yang relatif panas (22-35,4°C) dan pola ladang berpindah turut mempengaruhi produktivitas, sehingga revitalisasi perlu disertai pendampingan teknis budidaya yang berkelanjutan. Karakter rasa khas kopi robusta Baloi sesungguhnya merupakan keunggulan komparatif yang dapat menjadi basis diferensiasi dan penguatan merek apabila dikelola secara konsisten. Dalam RIPPM 2024-

2028, revitalisasi kebun komoditas unggulan kopi, karet, dan lada diposisikan sebagai program prioritas untuk menghidupkan kembali aset alam yang sempat terbengkalai. Lebih jauh, pengembangan kopi sebagai aset alam memiliki makna strategis sebagai penopang ekonomi alternatif yang lebih lestari di tengah dominasi sektor ekstraktif, sehingga optimalisasi modal alam ini sekaligus menjadi strategi mempersiapkan penghidupan masyarakat pada masa pascatambang.



Gambar 2. Buah Kopi dan Daun Kopi yang Merupakan Potensi Alam Desa Baloi.

Modal Finansial

Pengembangan Kopi Baloi merupakan upaya konversi aset alam menjadi nilai finansial melalui pola pemasaran *business-to-business* (B2B) ke pengumpul besar dan *business-to-customer* (B2C) yang dikelola BUMDes (Hasil RIPPM PT Maruwai Coal, 2024). Meskipun pendapatan rumah tangga rata-rata tampak tinggi karena bersumber dari banyak anggota keluarga, pendapatan dari sektor pertanian sendiri tergolong rendah dan rantai pemasarannya masih dikuasai pengijon serta pengepul. Pola ini sejalan dengan temuan Hailudin (2021) yang menunjukkan bahwa nilai tambah produk desa kerap tidak kembali secara optimal kepada produsen akibat lemahnya kelembagaan pemasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, penguatan fungsi BUMDes sebagai lembaga pemasaran kolektif menjadi prasyarat agar nilai tambah Kopi Baloi benar-benar dinikmati petani. Rendahnya pendapatan dari sektor pertanian tergambar dari rata-rata pendapatan petani yang hanya berkisar Rp 94.952 per bulan, jauh di bawah potensi nilai ekonomi kopi olahan (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). Ketergantungan pada sistem ijon dan pengepul memperlemah posisi tawar petani sekaligus menahan akumulasi modal di tingkat rumah tangga. Di sisi lain, modal finansial desa juga ditopang sumber non-pasar seperti dana desa dan dukungan CSR; namun tanpa penguatan akses permodalan usaha dan kelembagaan pemasaran kolektif, suntikan finansial tersebut

berisiko bersifat sementara dan belum mengubah struktur distribusi nilai tambah secara mendasar.

Modal Sosial

Desa Tumbang Baloi memiliki modal sosial yang kuat, dibuktikan oleh keberadaan BPD, Lembaga Adat (Mantir), PKK, Karang Taruna, BUMDes, dan Posyandu, serta forum desa yang dipimpin Kepala Desa dan Mantir Adat (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). Kekuatan ikatan internal ini mencerminkan *bonding social capital* yang tinggi. Namun, sesuai kerangka Putnam (2000), ditemukan kelemahan pada *bridging social capital*, yaitu jaringan yang menghubungkan BUMDes dengan distributor dan ritel di luar desa masih terbatas, sehingga rantai pemasaran produk masih berkutat pada pasar lokal. Diskoneksi inilah yang menjelaskan mengapa kapasitas produksi yang memadai belum diiringi penetrasi pasar yang luas, sehingga Kopi Baloi sulit ditemui secara luas meskipun sempat dipamerkan pada Kalteng Expo 2025 di Palangka Raya (COMDEV NEWS AlamTri, 2025). Temuan ini konsisten dengan kesimpulan banyak studi BUMDes terdahulu yang menempatkan lemahnya jaringan pemasaran sebagai kendala utama keberlanjutan usaha desa (Hailudin, 2021). Menariknya, kekuatan modal sosial Desa Tumbang Baloi tidak hanya bersifat horizontal di antara warga, tetapi juga vertikal berupa relasi kelembagaan yang harmonis antara BUMDes, pemerintah desa, Karang Taruna, dan PT Maruwai Coal (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). Relasi vertikal yang menghubungkan desa dengan institusi pemilik sumber daya dan kewenangan ini menjadi modal penting untuk mengakses dukungan program. Akan tetapi, kuatnya ikatan ke dalam dan ke atas tersebut belum diimbangi oleh jaringan ke samping menuju pelaku pasar di luar desa, sehingga ketimpangan antara *bonding social capital* dan *bridging social capital* menjadi simpul persoalan yang paling menentukan keberlanjutan usaha Kopi Baloi.

Realitas tersebut tergambar dari penuturan salah seorang informan dari kalangan masyarakat yang diberdayakan:

“Sejak ada pelatihan pengolahan kopi dari perusahaan pada 2019, kami jadi paham mengolah biji kopi hingga menjadi produk kemasan. Persoalannya ada pada pemasaran; kopi kami berkualitas, tetapi sulit menembus pasar di luar desa, sehingga sebagian besar masih kami jual ke pengepul dengan harga yang belum sebanding.”

— Petani kopi sekaligus anggota BUMDes Baloi Usaha Mandiri (Wawancara, Bu E / 07 November 2025)

Penuturan tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kapasitas produksi, melainkan pada keterbatasan jaringan pemasaran (*bridging social capital*) yang menghubungkan desa dengan pasar yang lebih luas.

Terlepas dari kendala pemasaran, program pemberdayaan telah memicu pergeseran pola pikir (*shifting mindset*) petani dari subsisten menjadi *agropreneur*. Sejalan dengan kerangka dimensi kekuasaan dalam pemberdayaan (Tchida & Stout, 2024), masyarakat mulai memiliki kedaulatan ekonomi dan kekuatan atas sumber daya mereka, sehingga Kopi Baloi menjadi instrumen membangun resiliensi dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Sehingga kemudian, transformasi sosial semacam ini meningkatkan tumbuhnya rasa percaya diri dan tanggung jawab kolektif masyarakat yang merupakan capaian pemberdayaan berbasis aset.

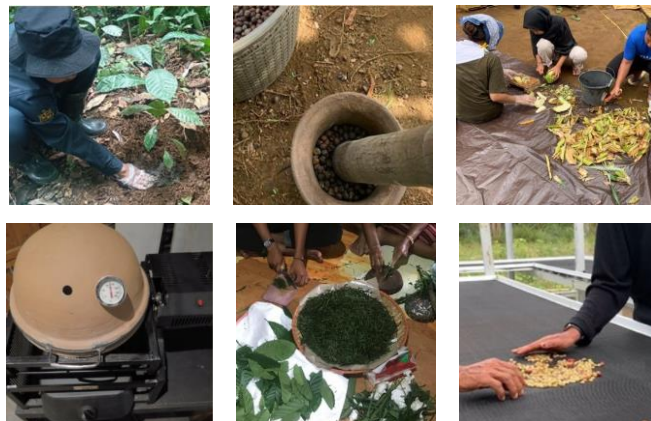
Modal Fisik

Desa memiliki infrastruktur dasar berupa Pustu, Polindes, Posyandu, pasar, tandon air bersih, dan penguat sinyal komunikasi. Program CSR menambah modal fisik melalui peralatan pasca panen serta standarisasi pengemasan dan pelabelan yang memungkinkan produk naik kelas dan memenuhi standar pasar. Dukungan sarana semacam ini sejalan dengan temuan Wahyuningsih et al. (2023) bahwa program CSR perusahaan tambang yang menysasar penyediaan sarana-prasarana dan pemberdayaan mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, fasilitas sekolah masih kurang memadai dan sebagian sanitasi rumah tangga belum layak, sehingga modal fisik desa belum sepenuhnya menopang kualitas hidup warga (Hasil RIPPM PT Maruwai Coal, 2024). Standarisasi pengemasan dan pelabelan yang difasilitasi CSR termasuk pencantuman logo halal dan label Adaro Minerals pada produk merupakan penguatan modal fisik yang sekaligus membuka peluang produk naik kelas memenuhi standar pasar formal. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur jalan yang belum kunjung diperbaiki menimbulkan biaya transportasi yang tinggi dan turut menghambat distribusi produk ke luar desa. Dengan demikian, defisit modal fisik pada aspek konektivitas berkelindan dengan lemahnya jaringan pemasaran, sehingga perbaikan sarana logistik menjadi prasyarat bagi keberhasilan penetrasi pasar Kopi Baloi.

Kolaborasi BUMDes Baloi Usaha Mandiri dengan CSR PT Maruwai Coal

Kolaborasi tripartit antara BUMDes, CSR PT Maruwai Coal, dan masyarakat diwujudkan dalam hasil Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) 2024--2028, dengan BUMDes ditempatkan sebagai lokomotif ekonomi desa. Program ini merupakan bagian dari delapan pilar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor pertambangan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824

K/30/MEM/2018, yang mencakup pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas, dan infrastruktur penunjang. Penguatan kapasitas BUMDes antara lain dilakukan melalui pelatihan tata kelola dan tata laksana BUMDes pada Februari 2025 yang diikuti lima desa terpilih berdasarkan *Sustainable Livelihood Approach*, termasuk Desa Tumbang Baloi (COMDEV NEWS AlamTri, 2025). Hal tersebut merupakan pola kolaborasi yang mencerminkan praktik *Creating Shared Value* yang berupaya menyelaraskan kepentingan ekonomi perusahaan dengan kesejahteraan masyarakat sekaligus menuntut pengelolaan pemangku kepentingan yang partisipatif.



Gambar 3. Praktik Pemberdayaan Kolaborasi BUMDes Baloi Usaha Mandiri dengan CSR PT Maruwai Coal.

Kendati demikian, dokumen perencanaan perusahaan sendiri mengakui bahwa penguatan BUMDes belum sepenuhnya optimal. Hasil Penelitian RIPPM PT Maruwai Coal (2024) mencatat bahwa dinamika BUMDes di wilayah operasionalnya masih mencari formula sinergitas antar multipihak, dan kelembagaan komunitas desa kerap masih dipandang sebagai wadah penerima bantuan alih-alih penggerak ekonomi anggotanya. Untuk Desa Tumbang Baloi secara khusus, perusahaan menempatkan BUMDes sebagai ujung tombak pengembangan jenis usaha kopi, namun hal itu menuntut pembentukan unit-unit usaha yang benar-benar diinisiasi dan dikelola BUMDe. Kondisi ini sejalan dengan temuan lapangan penelitian ini bahwa keberhasilan produksi belum diimbangi keberhasilan pemasaran, sehingga BUMDes berisiko terjebak pada ketergantungan terhadap pendampingan eksternal apabila kemandirian kelembagaan tidak segera dibangun.

Sebagai respons, rencana penguatan BUMDes dalam RIPPM 2024--2028 diarahkan pada beberapa kegiatan yang relevan dengan kebutuhan BUMDes Baloi Usaha Mandiri, yaitu pembentukan dan pelatihan manajemen BUMDes, pendampingan dan penguatan kelembagaan, identifikasi peluang bisnis beserta studi kelayakannya, serta penataan

administrasi dan akuntansi BUMDes sesuai standar pelaporan. Pada aspek pemasaran yang menjadi titik lemah, RIPPM merancang inisiasi forum kerja sama BUMDes lintas desa dan kecamatan serta pendirian outlet pemasaran usaha bersama BUMDes di Puruk Cahu sebagai ibu kota kabupaten, sekaligus skema pemasaran B2B dan B2C bagi produk unggulan desa. Rancangan ini secara konseptual merupakan upaya membangun *bridging social capital* yang selama ini menjadi kendala utama BUMDes, sehingga keberhasilan kelembagaan dan produksi dapat diteruskan menjadi keberhasilan penetrasi pasar yang lebih luas.

Pertemuan sekaligus perbedaan kepentingan antar aktor tampak dari hasil wawancara. Dari sisi pemerintah desa, kolaborasi dipandang sebagai peluang sekaligus harapan akan kemandirian:

“BUMDes Baloi Usaha Mandiri kami harapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Kolaborasi dengan program CSR perusahaan sangat membantu, terutama dari sisi pelatihan dan peralatan, namun harapan kami kedepan desa mampu memasarkan produknya secara mandiri dan tidak terus bergantung pada pendampingan.”— Aparatur Pemerintah Desa Tumbang Baloi (Wawancara, Pak Q / 07 November 2025)

Sementara itu, dari sisi perusahaan, program ditempatkan sebagai investasi pemberdayaan jangka panjang:

“Fokus kami bukan sekadar memberi bantuan, melainkan memberdayakan agar masyarakat mandiri, termasuk ketika masa tambang berakhir. Komoditas Kopi Baloi kami dorong dari hulu hingga hilir melalui penguatan kapasitas BUMDes dan pendampingan yang berkelanjutan.”

— Tim Community Development (CSR) PT Maruwai Coal (Wawancara, A / 08 November 2025)

Kedua penuturan tersebut memperlihatkan kesamaan visi tentang kemandirian, sekaligus menyatakan perlunya strategi pengalihan peran (*exit strategy*) agar ketergantungan masyarakat pada pendampingan eksternal berangsur berkurang.

Sebagai bukti penguatan kapasitas, produk BUMDes Baloi Usaha Mandiri tampil pada Kalteng Expo 2025, sementara BUMDes binaan lain dari Desa Batu Tojah bahkan diundang menjadi narasumber pelatihan tingkat provinsi (COMDEV NEWS AlamTri, 2025). Namun, klaim keberhasilan yang bersumber dari publikasi internal perusahaan perlu dibaca secara kritis dan di triangulasi dengan temuan lapangan. Penelitian Wahyuningsih et al. (2023) mengingatkan bahwa keberhasilan program CSR tambang harus diukur dari sejauh mana ia menyiapkan kemandirian masyarakat, bukan sekadar capaian kegiatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di balik penguatan kapasitas tersebut, tantangan pada aspek distribusi dan

bridging social capital masih nyata, sehingga keberhasilan kelembagaan belum sepenuhnya diikuti keberhasilan penetrasi pasar.

Selain itu, temuan Pemetaan Sosial mencatat bahwa kehadiran perusahaan tidak hanya berdampak positif (kesempatan kerja, pelatihan pengolahan kopi, bantuan pendidikan dan kesehatan), tetapi juga menimbulkan keluhan masyarakat, yaitu polusi udara yang dikaitkan dengan gangguan pernapasan serta persepsi adanya hambatan kualifikasi dalam perekrutan tenaga kerja lokal, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia (Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal, 2025). Temuan ini penting untuk menjaga objektivitas analisis, bahwa penciptaan nilai dalam pertambangan menuntut manajemen pemangku kepentingan yang adil dan responsif. Dengan demikian, pemberdayaan yang berkelanjutan menuntut bukan hanya penguatan ekonomi, tetapi juga pengelolaan relasi sosial dan lingkungan yang adil antara perusahaan dan masyarakat.

Kehadiran BUMDes dalam penelitian ini terbukti memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan unit usaha dan peningkatan keterampilan warga, termasuk juga pada penekanan pada penguatan kapasitas yang juga tampak nyata pada pelatihan pengolahan kopi sejak 2019 yang mengubah petani subsisten menjadi pelaku usaha. Transformasi sosial berupa tumbuhnya kepercayaan diri dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam penerapan ABCD turut terkonfirmasi pada pergeseran pola pikir petani Tumbang Baloi menjadi *agropreneur*. Dari sisi CSR, hasil ini menguatkan temuan Wahyuningsih et al. (2023) bahwa program CSR perusahaan tambang yang berorientasi pemberdayaan mampu menyiapkan kemandirian masyarakat menghadapi masa pascatambang.

Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi yang membedakannya dari kajian terdahulu. Jika sebagian besar studi BUMDes menekankan keberhasilan kelembagaan dan peningkatan pendapatan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan produksi belum tentu diiringi keberhasilan pasar akibat lemahnya *bridging social capital*. [Temuan ini sejalan dengan hasil tulisan Rathobei et al. (2024) bahwa penciptaan nilai yang luas dalam pertambangan menuntut pengelolaan pemangku kepentingan yang partisipatif, termasuk dalam menanggapi keluhan sosial-lingkungan masyarakat.] Dengan demikian, kolaborasi BUMDes--CSR di Desa Tumbang Baloi memperlihatkan praktik *Creating Shared Value* yang menjanjikan, tetapi keberlanjutannya menuntut perluasan jaringan pasar dan relasi yang lebih adil antara perusahaan dan masyarakat. Posisi inilah yang menjadi sumbangan utama penelitian ini bagi pengembangan teori dan praktik pemberdayaan masyarakat di wilayah lingkaran tambang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai wilayah Ring I operasional PT Maruwai Coal, Desa Tumbang Baloi menghadapi tantangan berupa ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif serta tingginya kerentanan pendapatan rumah tangga akibat fluktuasi harga komoditas karet dan kopi. Kondisi ini diperparah oleh panjangnya rantai tata niaga kopi dan dominasi tengkulak atau pengijon yang menyebabkan nilai tambah komoditas tidak kembali secara optimal kepada petani, sehingga peningkatan produksi tidak serta-merta berdampak pada kesejahteraan mereka. Dari perspektif sosiologis, persoalan ini berakar pada kesenjangan modal sosial, di mana ikatan internal masyarakat (*bonding social capital*) tergolong kuat, namun jaringan menuju pasar eksternal yang lebih luas (*bridging social capital*) masih sangat lemah, sehingga keberhasilan produksi belum mampu diikuti oleh keberhasilan pemasaran.

Merespons persoalan tersebut, BUMDes Baloi Usaha Mandiri berkolaborasi dengan program CSR PT Maruwai Coal melalui kemitraan tripartit yang dituangkan dalam Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) 2024-2028. Intervensi ini menerapkan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dengan memobilisasi lima modal komunitas, yaitu modal manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam. Implementasinya direalisasikan melalui pembinaan Kelompok Tani Kopi sejak tahun 2019, transfer teknologi pengolahan pascapanen, standarisasi kemasan dan pelabelan, hingga langkah hilirisasi yang berhasil mengubah biji kopi mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti "Kopi Baloi" dan produk inovatif turunan berupa Teh Daun Kopi "Baloi's Signature".

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan ABCD tersebut berhasil mendorong perubahan sosial terencana, yang ditandai dengan pergeseran pola pikir petani dari taraf subsisten menjadi *agropreneur*, serta tumbuhnya kepercayaan diri dan tanggung jawab kolektif di dalam masyarakat. Kendati demikian, keberhasilan ini belum sepenuhnya berkelanjutan karena kesenjangan modal sosial masih nyata terjadi; lemahnya jaringan *bridging social capital* membuat rantai pemasaran Kopi Baloi tetap didominasi oleh pasar lokal dan pengepul tradisional. Temuan ini konsisten dengan studi BUMDes terdahulu yang menempatkan kendala jaringan pemasaran sebagai hambatan utama pembangunan ekonomi desa. Di samping itu, keberlanjutan program juga dibayangi oleh tingginya ketergantungan masyarakat pada pendampingan pihak eksternal, serta adanya keluhan sosial-lingkungan terkait polusi udara dan hambatan kualifikasi rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan saran secara berjenjang pada setiap modal komunitas. Pada modal sosial, diperlukan penguatan *bridging social capital* melalui kemitraan strategis dengan distributor, jaringan ritel modern, dan optimalisasi pemasaran digital, sekaligus percepatan realisasi outlet pemasaran bersama BUMDes di Puruk Cahu dan skema B2B/B2C yang telah dirancang dalam RIPPM. Pada modal finansial, fungsi BUMDes sebagai lembaga pemasaran kolektif perlu diperkuat agar dapat memutus ketergantungan petani pada pengijon dan pengepul, disertai perluasan akses permodalan usaha, misalnya melalui skema kredit mikro atau koperasi simpan pinjam petani kopi, sehingga nilai tambah produk benar-benar kembali kepada produsen di tingkat rumah tangga. Pada modal manusia, program kaderisasi dan pelatihan kewirausahaan perlu diarahkan secara khusus kepada kelompok muda guna menekan angka pengangguran usia produktif sekaligus menjamin regenerasi petani dan pengelola BUMDes. Pada modal alam, revitalisasi kebun kopi, karet, dan lada yang sempat terbengkalai perlu disertai pendampingan teknis budidaya yang berkelanjutan, agar keunggulan komparatif rasa khas kopi robusta Baloi tetap terjaga sebagai basis diferensiasi produk. Pada modal fisik, perbaikan infrastruktur jalan dan sarana logistik menjadi prasyarat mendesak untuk menekan biaya transportasi sekaligus memperlancar distribusi Kopi Baloi ke pasar di luar desa.

Selain penguatan lima modal tersebut, strategi *branding* produk perlu diperbaiki secara progresif, termasuk melalui konsistensi standar kemasan, pelabelan, dan narasi merek yang mengangkat keunikan Kopi Baloi sebagai produk khas Dayak Kalimantan Tengah, agar mampu mengonversi keunggulan produksi menjadi keunggulan pasar yang kompetitif baik pada skema *business-to-business* (B2B) maupun *business-to-customer* (B2C). Pada aspek kelembagaan, tata kelola dan tata laksana BUMDes Baloi Usaha Mandiri perlu terus diperkuat melalui pelatihan manajemen, penataan administrasi, dan akuntansi sesuai standar pelaporan, sekaligus disertai rancangan skema kemandirian bertahap (*exit strategy*) agar peran pendampingan CSR dapat dialihkan secara konsisten kepada kapasitas mandiri BUMDes. PT Maruwai Coal juga disarankan lebih responsif dan transparan dalam menindaklanjuti keluhan sosial-lingkungan masyarakat, khususnya terkait polusi udara dan hambatan kualifikasi perekrutan tenaga kerja lokal bagi kelompok rentan seperti lansia, sebagai wujud keadilan pemberdayaan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Bagi agenda akademik mendatang, peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi program ini terhadap pendapatan riil rumah tangga petani, serta studi komparatif antar desa binaan lainnya di

wilayah Ring I PT Maruwai Coal, guna memperkaya pemahaman mengenai keberlanjutan pemberdayaan berbasis aset di wilayah lingkaran tambang..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Tumbang Baloi, pengurus BUMDes Baloi Usaha Mandiri, serta tim Community Development PT Maruwai Coal atas keterbukaan dan partisipasinya selama penelitian..

DAFTAR REFERENSI

- Amnurdiant, F. A., Firmansyah, R., Banjarnahor, R. B. S., Wahyudi P, I., & Utomo, D. A. (2024). Transformasi pembangunan desa di Indonesia: Melalui pendekatan top-down ke partisipatif dalam kerangka UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Aziza, N., Aprila, N., Novita Sari, V., & Agus, A. (2024). Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Panca Mukti untuk mewujudkan desa kreatif. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 2(2), 467–474. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.614>
- Bela, H. Y., Annshori, M. F., & Marshalita, M. (2024). Asset-based community development. *Majalah Pendidikan*, 8(1), 61–74. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.61-74>
- COMDEV NEWS AlamTri. (2025). *Comdev News AlamTri Geo* (Edisi I, Mei 2025; Edisi II, Oktober 2025). Community Development PT Adaro Minerals Indonesia (PT Maruwai Coal).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Labuhan Haji, Lombok Timur. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Hasil Penelitian Pemetaan Sosial PT Maruwai Coal. (2025). *Laporan pembaruan pemetaan sosial Ring 1: Kelurahan Muara Tuhup, Desa Tumbang Baloi, dan Desa Batu Tojah*. PT Maruwai Coal.
- Hasil Penelitian Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Maruwai Coal 2024–2028. (2024). *Rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM) PT Maruwai Coal 2024–2028*. PT Maruwai Coal.
- Herlina, E., Tukiran, M., Yusnita, N., Hermansyah, H., & Andrianto, M. T. (2022). Peran pengembangan sumber daya manusia sebagai agen perubahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(6), 487–497. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i6.346>
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.

- Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers* (D. Cartwright, Ed.). Harper & Row.
- Lippitt, R., Watson, J., & Westley, B. (1958). *The dynamics of planned change: A comparative study of principles and techniques*. Harcourt, Brace & World.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rasyid, A., et al. (2025). The concept of community empowerment versus community advancement: A comparative study in the context of social development in Indonesia. *SIGn Journal of Social Science*, 5(2), 97–112. <https://doi.org/10.37276/sjss.v5i2.430>
- Rathobei, K. E., Ranängen, H., & Lindman, Å. (2024). Exploring broad value creation in mining: Corporate social responsibility and stakeholder management in practice. *The Extractive Industries and Society*, 17, Article 101412. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101412>
- Rheinatus, A. B. (2021). Distansiasi, pemisahan, dan reflektivitas sebagai penggerak perubahan masyarakat: Suatu refleksi terhadap modernitas dalam pemikiran Anthony Giddens. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia*, 5(2), 417–428. <https://doi.org/10.31949/diglosia.v5i2.3022>
- Setiawan, F. (2025). Kerangka penghidupan berkelanjutan (SLA) melalui inovasi sosial: Studi kasus program CSR "Harvest Moon" PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Banten 3 Lontar. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 688–700. <https://doi.org/10.30872/lis.v6i2.5702>
- Tchida, C. V., & Stout, M. (2024). Disempowerment versus empowerment: Analyzing power dynamics in professional community development. *Community Development*, 55(3), 386–406. <https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2247470>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wahyuningsih, N., Aipassa, M. I., & Paselle, E. (2023). Implementasi program corporate social responsibility (CSR) perusahaan tambang batubara di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Riset Pembangunan*, 6(1), 39–50. <https://doi.org/10.36087/jrp.v6i1.165>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.